

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR MAKRO EKONOMI YANG MEMENGARUHI
DANA PIHAK KETIGA PADA BANK UMUM SYARIAH
DAN UNIT USAHA SYARIAH TAHUN 2011-2015**

***THE ANALYSIS OF MACRO ECONOMIC FACTORS
THAT AFFECTS THIRD PARTY FUND OF SHARIA COMMERCIAL BANK
AND SHARIA BUSINESS UNIT OPERATIONS 2011-2015***

Fatmi Hadiani

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung
fatmihadiani@yahoo.com

ABSTRAK

Perkembangan bank syariah semakin meningkat sejak awal 2000. Salah satu faktor yang menggambarkan perkembangan suatu bank adalah jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor makro ekonomi pada objek penelitian ini, dapat memengaruhi jumlah dana pihak ketiga pada bank umum syariah. Bank Umum Syariah, berdasarkan UU No. 21 tahun 2008, adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan nasional per kapita, jumlah uang beredar, dan tingkat inflasi. Data yang digunakan adalah data triwulanan dan dianalisis dengan menggunakan model regresi berganda. Hasil yang didapat adalah pendapatan nasional per kapita berpengaruh negatif dan signifikan, jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan inflasi memberikan hasil tidak berpengaruh.

Kata kunci : dana pihak ketiga, pendapatan nasional perkapita, jumlah uang beredar
inflasi

ABSTRACT

The development of Islamic banks has increased since the beginning of 2000. One of the factors that describe the development of a bank is the amount of third party funds collected by the bank. This study aims to determine how much macroeconomic factors in the object of this study, can affect the amount of third party funds in sharia commercial banks. Sharia Commercial Bank, based on Law no. 21 years 2008, is a bank that runs its business activities based on sharia principles and in its activities provide services in payment traffic. The variables used in this study are per capita national income, money supply, and inflation rate. The data used are quarterly data, and analyzed by using multiple regression model. The results obtained are per capita national income has a negative and significant effect, the money supply has a positive and significant effect, while inflation gives no effect.

Keywords: *third party funds, per capita national income, money supply, inflation*

PENDAHULUAN

Bank merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan dana anggota masyarakat yang memiliki dana berlebihan (surplus) dan mendistribusikannya pada anggota masyarakat yang membutuhkan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 4 menjelaskan bahwa tujuan perbankan Indonesia adalah penunjang upaya membangun negara agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan anggota masyarakat lebih baik dan merata juga agar keadaan nasional lebih stabil. Bank syariah adalah badan usaha keuangan dengan kegiatan utamanya menyediakan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang setiap kegiatannya disesuaikan dengan prinsip agama Islam (UU No.10/1998). Salah satu cirinya adalah sistem bagi hasil (nonbunga) dalam membagi laba (profit). Jumlah bagi hasil (*profit sharing*) ini ditetapkan pada awal akad. Tidak sama dengan bunga, persentase bagi hasil akan berbeda setiap bulannya. Tujuan utama bank syariah umumnya adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi anggota masyarakat dan menjalankan kegiatan perbankan.

Setiap kegiatan perekonomian, termasuk juga kegiatan perbankan dalam menghimpun dana pihak ketiga, dipengaruhi faktor-faktor makro ekonomi. Pendapatan nasional per kapita, jumlah uang beredar, dan inflasi adalah faktor-faktor makro ekonomi yang dapat memengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga. Pendapatan rata-rata penduduk disebut pendapatan per kapita di suatu negara. Pendapatan per kapita didapat dari perhitungan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita juga dijadikan alat ukur kemakmuran suatu negara. Pendapatan seseorang akan memengaruhi besarnya dana

yang dikeluarkan untuk konsumsi dan menabung atau investasi. Menabung dapat dilakukan di bank dan menjadi dana pihak ketiga bagi bank.

Pengertian jumlah uang beredar menurut Rahardja dan Manurung (2008) adalah nilai keseluruhan uang yang beredar di tangan masyarakat. Faktor jumlah uang beredar juga dapat memengaruhi dana pihak ketiga. Jumlah uang beredar dalam arti luas adalah jumlah uang kartal dan giral ditambah dengan deposito berjangka. Peningkatan jumlah uang beredar menunjukkan peningkatan perekonomian masyarakat. Peningkatan deposito berjangka menunjukkan peningkatan sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi; sisa pendapatan ini disimpan di bank (bagi bank merupakan dana pihak ketiga).

Inflasi sangat memengaruhi kegiatan ekonomi baik sektor riil maupun moneter. Inflasi merupakan keadaan perekonomian yang terjadi kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum. Pada masa inflasi, daya beli menurun akibat lemahnya nilai mata uang untuk membeli barang dan jasa.

Penelitian ini terfokus pada permasalahan dengan rumusan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh pendapatan nasional per kapita terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah?
2. Bagaimana pengaruh jumlah uang beredar terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah dan unit usaha syariah?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah dan unit usaha syariah?
4. Bagaimana pendapatan nasional per kapita, jumlah uang beredar dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah dan unit usaha syariah?

Tujuan penelitian ini adalah

1. mengetahui bagaimana pengaruh pendapat nasional perkapita terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah;
2. mengetahui bagaimana pengaruh jumlah uang beredar terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah;
3. mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah;
4. mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan nasional perkapita, jumlah uang beredar dan inflasi secara simultan terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah.

Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Soemitra, 2009:61). Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1, Ayat 7-8). BUS (Soemitra, 2009:61) dapat berusaha sebagai bank devisa (bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, dan pembukaan *letter of credit* lainnya) dan bank nondevisa. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No.21 Tahun 2008, Pasal 1, Ayat 9). BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah (Soemitra,2009:62).

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional

yang berfungsi sebagai kantor induk dari unit yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan /atau unit syariah (UU No.21 Tahun 2008, Pasal 1, Ayat 10). UUS dapat menjalankan usaha sebagai bank devisa dan bank devisa (Soemitra, 2009:62).

Prinsip-Prinsip Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip syariah melarang menjalankan kegiatan ekonomi yang ada unsur riba, *maisyir*, *gharar*, dan jual beli barang yang diharamkan. Prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut (www.banksyariah.net).

1. Prinsip *mudharabah*, akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dengan *nisab* bagi hasil menurut kesepakatan awal. Jika usaha mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali jika kesalahan tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana.
2. Prinsip *musyarakah*, akad kerja sama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan keuntungan akan dibagi sesuai dengan *nisab* yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerja sama.
3. Prinsip *wadiah*, titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun kelompok (perusahaan, organisasi, dll) yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip, kapan pun penitip menghendaki.
4. Prinsip *murabahah*, akad jual beli yang ditambah dengan sejumlah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak,

yaitu penjual dan pembeli. Pada transaksi *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara tunai, tangguh, ataupun angsuran.

5. Prinsip *salam*, transaksi jual beli suatu barang di bidang pertanian yang harga jualnya terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang telah disepakati di awal. Bank hanya sebagai mediator antara pemasok dan pembeli.
6. Prinsip *istishna*, jual beli suatu barang tertentu (selain sektor pertanian) yang harga jualnya terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang telah disepakati di awal. Spesifikasi barang harus jelas jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlah.
7. Prinsip *ijarah*, akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa atau dengan diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.
8. Prinsip *qardh*, perjanjian pinjam - meminjam uang atau barang. *Qardh* dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan, tetapi pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak *qardh*.
9. Prinsip *rahn*, menahan salah satu harta pemilik/peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuannya untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
10. Prinsip *hawalah*, pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Tujuan *hawalah* adalah untuk membantu pemasok mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.
11. Prinsip *wakalah*, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian amanat dari satu pihak ke pihak lain. Orang yang diberikan amanat oleh orang lain, maka

ia akan melakukan apa yang diamanatkan kepada dirinya atas nama orang yang memberikan amanat tersebut.

Produk Penghimpun Dana

Giro merupakan dana milik pihak ketiga, disimpan di bank, dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam pelaksanaannya, giro dicatat oleh bank dalam suatu rekening yang disebut rekening koran. Sumber dana dalam bentuk ini termasuk dana yang sangat labil bagi bank karena dana rekening giro dapat ditarik setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank. Simpanan ini tidak memiliki batasan waktu (jatuh tempo). Simpanan ini sifatnya hanya titipan saja yang menggunakan prinsip *wadiah*. Simpanan dengan akad ini tidak menjanjikan imbalan, tetapi biasanya bank akan memberi bonus pada nasabah yang nilainya tidak diperjanjikan dari awal agar terhindar dari bunga (riba).

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pemilik dana yang merupakan pihak ketiga di bank dengan sistem penarikan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Simpanan deposito berprinsip *mudharabah*, yaitu dana yang sifatnya semi- tetap dan jatuh temponya merupakan perkiraan penarikan dana tersebut sehingga dapat diperkirakan.

Tabungan adalah simpanan dana pihak ketiga di bank dengan cara penarikan sesuai ketentuan yang berlaku. Bank syariah menggunakan dua jenis akad untuk produk tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menggunakan akad *wadiah* dipercayakan kepada bank. Dana ini merupakan 80% lebih dari total dana yang menggunakan prinsip *wadiah yad ad-dhamanah*, artinya nasabah hanya menitipkan dana di bank dan bank tidak wajib memberi imbalan, tetapi bank bisa

saja memberikan bonus kepada nasabah jika bank ingin memberikan. Tabungan lain yang menggunakan akad dengan prinsip *mudharabah*, yaitu keuntungan yang didapat akan dibagi antar- *shahibul mal* (dalam hal ini biasanya nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini pihak bank). Pada prinsip ini, juga ada ketentuan jarak waktu antara dana yang diberikan dengan waktu pembagian keuntungan karena untuk melakukan investasi dengan menggunakan dana tersebut diperlukan waktu yang cukup.

Teori Ekonomi Makro

Analisis dalam ekonomi makro menerangkan bagaimana permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian, masalah-masalah utama yang dihadapi setiap perekonomian, dan peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi (Sukirno, 2006:4). Masalah yang termasuk pembahasan dalam ekonomi makro di antaranya produksi (Produk Domestik Bruto dan Produk Nasional Bruto) dan perkembangan ekonomi, pendapatan nasional, pendapatan perkapita, pengangguran, neraca perdagangan dan pembayaran (ekspor-impor), inflasi, dan jumlah uang beredar.

Pendapatan Nasional Per Kapita

Menurut Sujarwo (2012), "Pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan perkapita digunakan sebagai alat ukur tingkat kemakmuran suatu negara pada suatu periode."

$$IPC = GNP : Pop$$

Keterangan :

IPC = *Income Per Capita* (pendapatan per kapita)

GNP = *Gross National Product* (produksi nasional kotor pada suatu periode)

Pop = Populasi (jumlah penduduk suatu negara pada suatu periode).

Jadi, pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu negara yang didapat dari hasil pembagian produksi nasional (pendapatan nasional dari pendekatan produksi) dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. (Sukirno, 2006)

Berdasar referensi dan tulisan Cakra (2011), pendapatan nasional dapat dihitung dengan tiga pendekatan yaitu :

1. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran.

$$Y = C + G + I + (X - M)$$

Keterangan :

Y = *National Income* (Pendapatan Nasional)

C = Konsumsi rumah tangga

I = Investasi

G = Belanja pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

2. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan.

$$Y = R + W + I + P$$

Keterangan :

Y = *National Income* (Pendapatan Nasional)

R = *Rent* (sewa); W = *Wages* (upah)

I = Investasi ; P = *Profit* (keuntungan)

3. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi.

$$Y = E + A + I + N + J$$

Keterangan :

Y = *National Income* (Pendapatan Nasional)

E = Ekstraktif (jumlah produksi pertambangan)

A = Agraris (jumlah produksi pertanian)

I = Industri (jumlah produk bidang industri)

N = Niaga (jumlah produksi perdagangan)

J = Jasa (jumlah jasa yang dihasilkan)

- Perhitungan pendapatan perkapita :
- Pendapatan per kapita/PNB perkapita = Pendapatan Nasional Bruto : Total jumlah penduduk.
- Pendapatan per kapita PDB per kapita = Pendapatan Domestik Bruto : Total jumlah penduduk.

Fungsi Konsumsi dan Tabungan

Murni (2009 :46) menjelaskan bahwa banyak faktor yang memengaruhi konsumsi masyarakat antara lain kekayaan, pendapatan, ekspektasi (ramalan masa datang), jumlah penduduk, suku bunga, dan tingkat harga. Akan tetapi, pada fungsi konsumsi, hanya diperlihatkan hubungan antara variabel konsumsi dan variabel pendapatan nasional atau pendapatan disposibel.

Persamaan fungsi konsumsi (Asfia Murni, 2009 :46) adalah

$$C = a + b Y$$

Keterangan :

$C_0 = a$: adalah besarnya konsumsi (C) pada saat pendapatan nasional sebesar nol atau dapat diartikan konsumsi bersifat otonom.

b : adalah besarnya *Marginal Propensity to Consume* (MPC)

$Y = Y_d$: adalah besarnya pendapatan nasional (Y) dan nilai pendapatan yang siap untuk dibelanjakan (Y_d).
 $Y_d = Y - T$. Bila perekonomian dua sektor belum ada pajak (T) artinya nilai $T=0$, maka $Y=Y_d$

Tabungan terjadi jika pendapatan masyarakat lebih besar daripada konsumsinya. Bila terjadi sebaliknya (konsumsi lebih besar dari pendapatan), yang terjadi adalah tabungan negatif atau *dissaving*.

$$C = C_0 + bY$$

Persamaan fungsi tabungan adalah

$$S = -a + (1-b) Y$$

Keterangan : $S = saving$ (tabungan)

Y = pendapatan

a = tabungan bernilai negatif ketika pendapatan sebesar nol

$(1-b)$ = menunjukkan nilai MPS

Penghimpunan Dana Bank Syariah

Kegiatan penghimpunan dana dapat dilakukan dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, penghimpunan dana juga dapat dilakukan dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (UU No.21 Tahun 2008, pasal 19 ayat 1-2). Dana yang terhimpun harus segera disalurkan karena Islam melarang adanya penumpukan harta bahkan Islam mendorong penggunaan secara produktif untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Dana pihak ketiga ini merupakan 80% lebih dari total dana yang dipercayakan kepada bank untuk dikelola bank. Dengan penyaluran yang baik, bank akan mendapatkan profit yang baik pula.

Inflasi

Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan harga naik secara keseluruhan dan terus menerus. Keadaan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, baik karena penyebab yang terjadi di dalam negeri atau karena penyebab di luar negeri. Menurut Murni (2009), inflasi adalah kenaikan

tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Definisi inflasi menurut Karim (2008: 135) adalah “Kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghargaan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa.”

Jenis-jenis Inflasi

Inflasi dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal, misalnya tingkat tinggi rendahnya/keparahannya, penyebabnya, dan asalnya (Karim, 2008 : 135). Inflasi berarti kenaikan harga barang dan jasa selama periode tertentu dan dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya, deflasi adalah jika terjadi penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa. Pada masa inflasi (dengan tingkat inflasi yang tinggi), seseorang akan merasa lebih aman jika menyimpan modalnya dalam bentuk barang berharga, rumah, dan lainnya dibandingkan ditabung. Karim (2008) dan Murni (2009:198) menjelaskan sebagai berikut.

1. Berdasarkan tinggi-rendahnya / keparahan
 - 1) *Moderate Inflation* adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Pada inflasi ini, masyarakat masih mau memegang uang daripada barang.
 - 2) *Galloping Inflation* adalah inflasi pada tingkat 20% sampai dengan 100%. Umumnya, masyarakat mulai membeli barang sebagai antisipasi kebutuhan.
 - c. *Hyper Inflation* adalah kenaikan harga terjadi dengan cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi beberapa kali lipat dalam waktu cepat dengan tingkat inflasi lebih dari 100%.
2. Berdasarkan penyebabnya

- 1) *Demand pull inflation* biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat yang mendorong naiknya permintaan. Jika permintaan barang/jasa melebihi total produksi tersedia, akibatnya harga akan cenderung naik.
 - 2) *Cost push inflation* terjadi bila biaya produksi mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan ini berasal dari kenaikan harga *input* seperti upah minimum, bahan baku, tarif listrik, BBM, dan barang *input* yang harus diimpor.
 - 3) *Imported inflation* terjadi karena kenaikan harga-harga barang impor, terutama jika barang tersebut berperan pada proses produksi.
3. Berdasarkan asalnya
- 1) Inflasi, yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*), biasanya karena defisit anggaran belanja negara yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, pinjaman luar negeri, kenaikan upah, dll
 - 2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*), biasanya disebabkan naiknya harga barang impor akibat naiknya biaya produksinya, tarif impor, kurs mata uang, dll.

Cara Mengatasi Inflasi

1. Kebijakan Moneter

- Kebijakan diskonto, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan suku bunga bank yang diharapkan dapat mengurangi permintaan kredit.
- Operasi pasar terbuka untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual SBI.

- Menaikkan cadangan kas sehingga uang yang diedarkan oleh bank umum menjadi berkurang.
- Kredit selektif merupakan kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit.

2. Kebijakan Fiskal

- Menaikkan tarif pajak dengan harapan masyarakat akan menyetor uang lebih banyak kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.
- Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
- Mengadakan pinjaman pemerintah, misalnya pemerintah memotong gaji pegawai negeri 10% untuk ditabung (pernah terjadi dimasa orde lama).

3. Kebijakan nonmoneter

- Hasil produksi dinaikkan
- Kebijakan upah, pemerintah tidak menaikkan upah saat inflasi
- Pengawasan harga, pemerintah menjaga stabilitas harga barang-barang tertentu.

Jumlah Uang Beredar

1. Pengertian Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar adalah “... nilai keseluruhan uang yang berada di tangan masyarakat. Jumlah uang beredar dalam arti sempit (*narrow money*) adalah jumlah uang beredar yang terdiri atas uang kartal dan uang giral” (Manurung, 2010). Pengertian jumlah uang beredar dalam arti sempit terdiri atas uang kartal dan uang giral yang dapat digunakan sebagai alat tukar, yang disebut dengan M_1 . Uang beredar dalam arti luas dinamakan M_2 . M_2 adalah M_1 ditambah tabungan dan

simpanan berjangka lain yang jangkanya lebih pendek termasuk rekening pasar dan uang dari pinjaman antar bank (*bank overweight*). M_3 adalah M_2 ditambah komponen-komponen lainnya terutama sertifikat deposito. Uang beredar dalam arti luas disebut juga dengan uang kuasi (*quasy money*).

$$M_1 = C + D$$

Keterangan :

M_1 = jumlah uang yang beredar dalam arti sempit

C = Uang kartal (uang kertas dan uang logam.

D = Uang giral

Untuk menghitung M_2 adalah :

$$M_2 = M_1 + TD$$

Keterangan :

M_2 = jumlah uang beredar dalam arti luas

TD = deposito berjangka (time deposit)

Secara teknis, yang dihitung sebagai jumlah uang beredar adalah uang yang benar-benar berada di tangan masyarakat sehingga tidak termasuk uang yang dikuasai bank.

2. Penghitungan Jumlah Uang Beredar

Pendekatan transaksional adalah jumlah uang beredar yang dihitung merupakan uang yang dibutuhkan untuk keperluan transaksi. Pendekatan ini menghitung jumlah uang beredar dalam arti sempit (*narrow money*) atau M_1 . Pendekatan likuiditas (*liquidity approach*) adalah pendekatan yang memandang jumlah uang beredar yang dihitung berdasarkan uang yang dibutuhkan untuk transaksi ditambah uang kuasi (*quasy money*). Perhitungan ini dilandasi bahwa walaupun uang kuasi merupakan aset finansial yang kurang likuid dibanding uang kertas, uang logam dan uang rekening giro, uang kuasi sangat mudah diubah menjadi uang yang dapat digunakan untuk keperluan transaksi. Pada dasarnya,

pendekatan ini menghitung jumlah uang beredar dalam arti luas (*broad money*) yang dikenal dengan M_2 dan merupakan M_1 ditambah uang kuasi.

Penelitian Terdahulu

1. Purniawan (2014) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposito Mudarabah) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (Tahun 2008-2013)”. Variabelnya Suku bunga, bagi hasil deposito *mudarabah*, jumlah kantor, inflasi. Metode regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah tingkat bunga, bagi hasil, jumlah kantor positif signifikan, sedangkan inflasi positif tidak signifikan.
2. Maria Ulfah (2011), judul “Analisis Perkembangan Asset, Dana Pihak dan (DPK) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”. Variabelnya hasil yang didapat, jumlah aset, DPK. Pembiayaan tidak mengalami peningkatan yang berarti dan cenderung stabil. Tingkat pertumbuhan aset, pertumbuhan DPK, dan pertumbuhan pembiayaan mengalami penurunan.
3. Mohammad (2010), judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia”. Variabel adalah tingkat suku bunga simpanan tabungan dan deposito, tingkat *effective rate* bagi hasil tabungan *mudharabah* dan deposito *murabahah*, inflasi, SBI, dan IHSG. Metode analisisnya menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan pada perbankan konvensional dan perbankan syariah, tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan,

sedangkan faktor moneter dan faktor perbankan berpengaruh signifikan.

4. Yuliana (2009), judul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah Tahun 2006-2008”. Variabel adalah tingkat bagi hasil, PDB, inflasi, dan ROI dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan PDB tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap DPK perbankan syariah tahun 2006-2008.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan metode dokumentasi dan metode penelitian kepustakaan. Untuk mendapatkan data tambahan yang berhubungan dengan perbankan syariah dan penghimpunan dana pihak ketiga diperoleh dari jurnal, gejala makro ekonomi berjalan diperoleh media masa, penelitian terdahulu, dan sumber lainnya. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, melalui media perantara yaitu berupa laporan Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasi, dari situs BPS (Biro Pusat Statistik), dan BI (Bank Indonesia), jurnal dll. Adapun objek yang digunakan adalah data Jumlah Dana Pihak Ketiga pada bank umum syariah dan unit usaha syariah periode 2011-2015 dari situs Bank Indonesia. Subjek penelitian berupa Pendapatan per kapita, Jumlah Uang Beredar dan Inflasi yang diambil dari situs Bank Indonesia.

Variabel Penelitian

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau yang dapat menyebabkan perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya

variabel bebas (Sugiyono, 2007:59). Semua variabel berskala numerik atau angka.

Variabel Operasional :

1) DPK (Y) = Dana nasabah yang dipercayakan kepada bank syariah dan/ atau unit usaha syariah berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; 2)

Pendapatan per kapita (X_1) = Rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu; 3) Jumlah Uang Beredar (X_2) = Jumlah uang yang beredar dalam perekonomian; 4) Inflasi (X_3)= Data merupakan rasio dari kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu.

Teknis Analisis

Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik sebagai berikut.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan data yang digunakan berdistribusi normal (Ghozali, dikutip oleh Sugiyono, 2007). Jadi bila tidak ditemukan autokorelasi, multikorelasi normal dan heteroskedastisitas berarti sudah memenuhi asumsi klasik regresi.

Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan mengetahui bahwa nilai residual. Nilai residual dikatakan normal jika sebagian besar nilai residual terstandarisasi tersebut mendekati nilai rata-ratanya. Uji ini hanya dilakukan terhadap nilai residual yang terstandarisasi (*multivariate*), uji ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*.

Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) , dilakukanlah uji autokorelasi. Perlu dua nilai bantu dari tabel Durbin-Watson, yaitu nilai dL dan nilai dU, dengan K=jumlah variabel bebas dan n = ukuran sampel . Nilai Durbin –Watson harus berada di antara nilai dU hingga 4-dU yang merupakan ketentuan tidak ada autokorelasi.

Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk membuktikan apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel *independen* bila dengan cara melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) = $1/ tolerance$. Bila, nilai VIF lebih kecil dari 10, tidak terdapat multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti ada variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan), disebut homoskedastisitas. Kondisi yang diharapkan adalah model regresi dengan homoskedastisitas. Uji yang digunakan adalah uji Glejser yaitu dengan menguji hubungan antara variabel penjelas dengan residual absolut yang ada.

Model Pengujian dengan Teknik Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda (*multiple linier regression method*). Analisis ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dana pihak ketiga (variabel terikat) dengan faktor-faktor yang memengaruhinya (variabel bebas) Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = DPK

a = konstanta

$\beta_1-\beta_3$ = koefisien regresi masing-masing variabel

X_1 = pendapatan perkapita

X_2 = jumlah uang beredar

X_3 = inflasi

ε = *error term* (variabel pengganggu) atau residual/variable yang tidak di uji semakin tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Berdasarkan *output* SPSS diperoleh nilai *Kolmogorof Smirnov* nya adalah 2,217 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual data berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah untuk mengetahui terjadi atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pada penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan nilai Durbin Watson. Hasil *output* SPSS menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,14, $n=36$, $K=3$, nilai $dL=1,2$ dan $dU=1,6$ kemudian dihitung nilai $(4-dU)=4-1,6=2,4$. Nilai $(4-dL)=4-1,2=2,8$. Nilai Durbin-Watson (2,14) ada di antara dU (1,6) dan $4-dU$ (2,4) berarti persamaan regresinya tidak mengandung masalah Autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan menyelidiki apakah terdapat korelasi antarvariabel *independent* dengan cara melihat *Variance Inflation Factor (VIF) = 1/ tolerance*. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10, diasumsikan tidak terdapat multikolinieritas. Hasil *output*

SPSS menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* masing-masing variabel bebas adalah Jumlah uang beredar(1,137), Inflasi (1,027), dan PDB(1,112). Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih dari 10, berarti pada regresi tidak ada multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Metode yang digunakan adalah metode uji Glejser yang menguji hubungan antara variabel penjelas dengan residual absolut yang ada. Hasil *output* SPSS menunjukkan bahwa pada uji F nilai sig sebesar 0,0626 adalah lebih besar dari 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Persamaan Regresi yang didapat adalah

DPK=-96307,534 + 10,284Jum uang beredar + 518,122Inflasi + 0,002PDB + ε
Interpretasi:

1. Setiap Jumlah uang beredar naik 1 trilyun, maka Dana Pihak Ketiga naik sebesar 10,284 milyar dengan asumsi var inflasi dan PDB tetap.
2. Setiap Inflasi naik 1 %, maka Dana Pihak Ketiga naik 518,122 trilyun dengan asumsi Jumlah uang yang beredar dan PDB tetap.
3. Setiap PDB naik 1 trilyun, maka Dana Pihak Ketiga naik sebesar 0,002 trilyun dengan anggapan Jumlah uang yang Beredar dan inflasi tetap.

Berdasarkan uji parsial masing-masing variabel bebas dengan uji t , diperlihatkan hanya inflasi, variabel bebas yang memberikan pengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga. Keadaan ini diperkuat oleh nilai probabilitas (P-value) atau nilai Sig dari *output* SPSS bernilai kurang dari 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hanya inflasi

adalah variabel bebas yang memberi pengaruh signifikan pada Dana Pihak Ketiga.

Uji variabel-variabel bebas secara simultan memperlihatkan tidak ada variabel bebas yang memberi pengaruh yang signifikan pada variabel DPK. Hal ini diperkuat dengan nilai *output* SPSS yakni 1 nilai P-value (Sig) sebesar 0,742 lebih besar dari 0,05. Dari *output* SPSS didapat bahwa hanya nilai koefisien determinasi atau *R square* dari variabel-variabel bebas adalah sebesar 6%, artinya hanya 6% variabel-variabel bebas yang memengaruhi Dana Pihak Ketiga, dan sisanya adalah sebesar 94% dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan pertama, secara parsial, dana pihak ketiga tidak dipengaruhi signifikan pendapatan nasional per kapita. Kedua, secara parsial dana pihak ketiga tidak dipengaruhi jumlah uang beredar. Ketiga, secara parsial dana pihak ketiga dipengaruhi inflasi, sedangkan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dana pihak ketiga.

Variabel-variabel bebas memengaruhi variabel dpk hanya 6 % (*R square*). Sisanya 94% mendapat pengaruh dari faktor lain. Faktor-faktor tersebut tidak dibahas pada penelitian ini. Hasil penelitian ini memunculkan pertanyaan, faktor makro apa lagi yang mungkin memengaruhi dana pihak ketiga. Kemungkinannya adalah faktor makro yang merupakan kebijakan moneter misalnya tingkat bunga SBI dan deposito juga tingkat bagi hasil SBIS, dapat dijadikan variabel bebas yang memengaruhi dana pihak ketiga pada penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Bank Indonesia. TT. *Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013*. Jakarta: Bank Indonesia.
www.bi.go.id/NR/rdonlyres/77FFB81A.../OutlookBS2013seminar1.pdf.
- Bank Indonesia. TT. *Perkembangan PDB di Indonesia*.
<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/635C6B65-6041-4F89-8147-21323069C371/28185/14MetadataPDB2012.pdf>.
- Bank Indonesia. 2011. *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*, Desember. Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto. 2008. *Ekonomi Makro Islam Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Manurung, Rahardja. TT. "Inflasi dan Jenis-Jenis Inflasi".
<http://id.shvoong.com/society-and-news/news-items/2008088-inflasi-dan-jenis-jenis-inflasi/>
- Murni, Asfia. 2009. *Ekonomika Makro*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurdian, Farikh. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah dan Kenvensional di IndonesiPurniawan, Edip. 2014. "Faktor yang Memengaruhi DPK (Deposito Mudarabah) Ppda Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia".
www.uns.ac.id/9634.pdf.
- Nurdian, Farikh. TT. "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia"

- <http://cintasyariah.wordpress.com/2010/02/25/perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/>.
- Nurdian, Farikh. TT. “Prinsip Bank Syariah”.
<http://www.banksyariah.net/2012/07/prinsip-bank-syariah.html>.
- Setyowati, Endang. 2008. “Manajemen Likuiditas Perbankan Syariah”.
<http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/11/manajemen-likuiditasperbankan-syariah.html>.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Medan: Kencana Prenada Media Group.
- Ulfa, Maria. 2011. “Analisis Perkembangan Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”.
- www.gunadarma.ac.id/library/article/postgraduate/manajemen/perbankan/artike91207039.pdf.
- Ulfa, Maria. TT. “Perkembangan Bank Syariah di Indonesia”
<http://cintasyariah.wordpress.com/2010/02/25/perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/>.
- Ulfa, Maria. TT. “Prinsip Bank Syariah”.
<http://www.banksyariah.net/2012/07/prinsip-bank-syariah.html>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4-6CF9-4DF5-A674-0073B0A6168A/14396/UU_21_08_Syariah.pdf.